

MODEL PROGRAM PENDIDIKAN GURU VOKASIONAL BERBASIS KEDAERAHAN DAN INTEGRATIF

Billy M.H. Kilis

Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado
billymorriskilis@gmail.com

Abstrak. Perubahan orientasi dan paradigma pendidikan yang memberi ruang dan kesempatan pada pendidikan vokasi berkembang di Indonesia, memunculkan masalah yang serius pada penyediaan guru, relevansi dan kualitas pendidikan. Penyediaan guru yang relevan tidak serta merta dapat disiapkan LPTK yang ada di daerah dimaksud. Otonomi daerah mendorong pula pembangunan berbagai SMK baru yang berdasarkan kebutuhan dan kearifan local yang pada akhirnya memunculkan masalah kekurangan guru yang relevan. Disisi lain implementasi pendidikan vokasi masih belum terencana dengan baik dan masih cenderung parsial sehingga perlunya kesamaan persepsi dalam pengembangan pendidikan guru vokasional. Sekolah-sekolah yang dikembangkan di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara memiliki jenis vokasi yang sangat variatif dan tidak dimiliki oleh Fatek, bahkan Unima sebagai LPTK yang diberi wewenang dalam pendidikan guru vokasi. Pada kasus dalam amatan penulis ada sebuah SMK di daerah Bolaang Mongondow, yang membuka jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ), akuntansi, pertanian dan keperawatan. Untuk itu dibutuhkan suatu model program pendidikan guru vokasional berbasis kedaerahan, sesuai kebutuhan dan diselenggarakan secara integratif.

Kata kunci: LPTK, pendidikan vokasional, SMK

Abstract. Changes in orientation and educational paradigm that gives space and opportunity in developing vocational education in Indonesia, raises serious issues on providing teachers, relevance and quality of education. Provision of relevant teachers not necessarily be prepared LPTK exist in the areas concerned. Regional autonomy also encourage the development of a range of new vocational needs and local knowledge, which in turn raises the issue of the relevant teacher shortage. On the other hand the implementation of vocational education is still not well planned and still tend to be partial so that the need for a common perception in the development of vocational teacher education. The schools were developed in several urban districts in North Sulawesi has a very varied type of vocation and not owned by Fatek, even UNIMA as LPTKs authorized in vocational teacher education. In the case of the observations of the authors there is a vocational school in the area Bolaang Mongondow, which opened vocational Engineering Computer Networking (TKJ), accounting, agriculture and nursing. That requires a model of vocational teacher education programs based on regionalism, as needed and organized in an integrative way.

Keywords: LPTK, vocational education, SMK

PENDAHULUAN

Sekurangnya terdapat dua permasalahan besar dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Pertama tuntutan kuantitatif komposisi SMK untuk mencapai target sesuai rencana strategi jangka panjang kemendikbud dan kedua otonomi daerah yang memunculkan berbagai SMK yang dibangun berbasis kedaerahan. Kedua permasalahan tersebut memunculkan masalah yang sama yaitu ketersediaan guru yang relevan dengan kebutuhan. Pada sisi yang lain dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, LPTK dituntut untuk segera

menyiapkan pendidikan guru yang professional untuk memenuhi kebutuhan dimaksud. Tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan pendidikan regular dan konvensional, sehingga dibutuhkan suatu model program pendidikan guru professional. Akibat dari masalah tersebut yaitu pendidikan guru professional harus berbasis lokal dan dilaksanakan secara integrative, mengingat pula di seluruh Indonesia terdapat beragam pendidikan kedinasan/profesi yang telah memiliki sarana dan prasarana. Kondisi tersebut disatu sisi merupakan masalah, tetapi disisi yang lain merupakan potensi yang dapat dijadikan solusi untuk merencanakan suatu model program pendidikan.

Kenyataan yang ada di Sulawesi Utara ada beberapa SMK kedinasan berubah menjadi SMK umum, selain SMU yang berubah menjadi SMK. Secara tidak langsung memunculkan permasalahan pada penyiapan guru yang sesuai dengan kompetensinya. Pada tahap awal mungkin belum bermasalah, tetapi pada beberapa tahun kedepan menjadi masalah yang pelik. Sebaliknya ada SMK yang dibangun hanya berdasarkan kebutuhan, dengan tidak melihat ketersediaan guru, juga bermasalah untuk jangka pendek, bila tidak segera disiapkan guru yang relevan. Secara kasat mata model program melibatkan beberapa komponen terkait baik pemerintah daerah, dinas pendidikan maupun kementerian yang membawahi pendidikan kedinasan di daerah.

Di Sulawesi utara terdapat beberapa pendidikan kedinasan setara SMK, yang dikelola yayasan maupun langsung di bawah kementrian terkait seperti : Keperawatan, Kesehatan, Perikanan, Pertanian, Pertambangan dll. Pada beberapa SMK juga semakin variatif dalam program studi dan tidak terbatas pada kejuruan tertentu seperti contoh : ada SMK yang mengelola program studi kejuruan akuntansi, teknik computer jaringan, dan kesehatan, ada SMK yang dibangun dari basis kedinasan, dan ada pula dari kebutuhan suatu kabupaten/kota. Pada akhirnya SMK yang telah dibangun membutuhkan guru dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu model program pendidikan guru professional berbasis *local* dan *integrative*. Konsep program pendidikan harus memenuhi kebutuhan guru dan dilaksanakan dalam waktu singkat, serta diupayakan berkompetensi yang sesuai. Model tersebut harus melibatkan seluruh komponen atau stakeholder

pendidikan, maupun fasilitas diluar LPTK atau memanfaatkan pendidikan kedinasan yang tersedia.

LPTK menyiapkan kurikulum dan SDM untuk didaktik metodik, sedangkan sekolah kedinasan menyiapkan instruktur dan peralatan. Model yang lain yaitu semua instruktur sekolah kedinasan yang ada dibekali dengan pendidikan profesi guru SMK yang dikelola LPTK. Model yang lain yaitu LPTK menjadi pusat pengembangan guru professional, dimana seluruh guru dan calon guru disiapkan bersama, melakukan praktek pada lembaga kedinasan yang tersedia dan dunia usaha/industry. Komposisi dosen pada LPTK melibatkan guru instruktur dari pendidikan kedinasan. Permasalahan dalam kajian ini yaitu bagaimana model program pendidikan guru professional berbasis local dan integrative?

Menurut Buckley dan Caple (2004:6), terdapat hubungan antara pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Tantangan yang dihadapi dewasa ini yaitu orientasi pada tujuan praktis dan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan nyata dalam pekerjaan. Implikasi dunia pendidikan pada lembaga persekolahan, yang semula dilandasi orientasi keilmuan terus berpacu mengadaptasi pola-pola pelatihan di industry maupun bisnis (Kuswana : 2013: 21). Pengembangan guru juga dilakukan dari guru pemula menjadi guru professional, sesuai permendiknas No.27 tahun 2010 tentang program induksi bagi guru pemula. Pada pasal 1 peraturan dimaksud program induksi meliputi kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan dan praktek. Pada pasal 2 membimbing guru pemula agar segera dapat beradaptasi. Program induksi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan guru (Wukir,H. 2012: 69).

METODE

Metode dalam penelitian ini yaitu survey yang dilakukan pada guru dan Kepala Sekolah SMK di beberapa Kabupaten Kota di Sulawesi Utara, termasuk kondisi fisik dan administrasinya. Materi survey antara lain meliputi : pendapat tentang pengelolaan beberapa program studi yang sesuai dengan kebutuhan local, kebutuhan guru yang professional dan model program pendidikan guru yang sesuai dengan minat dan kebutuhan guru. Persepsi guru untuk memenuhi

kebutuhan guru dari aspek pengembangan vokasi. Kajian meliputi : Pendidikan SMK berbasis Lokal, Pendidikan kedinasan, Model program pendidikan guru professional berbasis local, Model program pendidikan guru professional yang integrative, Model pelatihan profesi, Model pengembangan dan gabungan, Model program pendidikan guru professional sebagai alternative.

Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Utara, meliputi beberapa kabupaten kota yang memiliki SMK. Kabupaten kota yang menjadi sampel yaitu : Manado, Minahasa, Tomohon, Bitung, Bolaang Mongondow, Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara. Metode Penelitian Survey dan kajian pustaka. Survey dilakukan di beberapa SMK untuk mengetahui keadaan SMK, program studi, keadaan guru termasuk kebutuhan dan kondisi SMK dewasa ini. Kajian pustaka dilakukan untuk membahas model program pendidikan yang relevan dengan kondisi yang ada, termasuk permasalahan yang ada dewasa ini dan akan datang. Populasi dan sampel Populasi yaitu seluruh SMK di Sulawesi Utara, sedangkan sampel yaitu beberapa SMK di kabupaten Minahasa, Bolmong dan Manado, Bitung. Di Bolmong SMK Nanasi, Di Minahasa SMK Kakas, Manado SMK Keperawatan dan Bitung SMK Perikanan. Pendidikan kejuruan menurut undang-undang merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta belajar terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, adapun pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan keahlian terapan tertentu berupa program diploma dan setingkat sarjana terapan, magister terapan serta doctor terapan (Kuswana, 2013: 3). Kajian ini pada tataran pendidikan menengah atau kejuruan vokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil survey ditemukan bahwa sebagian besar SMK yang dibangun belum mempertimbangkan ketersediaan guru, dan lebih berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, termasuk dengan pemilihan program studi. Program studi yang dikelola belum sepenuhnya didasarkan pada ketersediaan guru maupun fasilitas. Rata-rata program studi masih memiliki satu guru yang relevan, bahkan ada yang memang belum memiliki guru tetap, atau masih honorer. Ketersediaan alat masih terbatas, Model pendidikan guru vokasi harus mengacu pada landasan undang-undang tentang system pendidikan nasional nomor 20

tahun 2003 pasal 3 yang disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu factor untuk pencapaian tujuan pendidikan, melalui Pengaturan yang dieujudkan pada beberapa undang-undang antara lain UU no 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dan undang-undang dikti 2012. Pola system pendidikan nasional mengikuti alur pendidikan prasekolah; pendidikan dasar; pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan dimaksud pendidikan guru vokasi telah berada pada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri dari program strata 1, S2 dan S3. (Pendidikan akademik) untuk pendidikan vokasi disebut sarjana terapan; magister terapan dan doctor terapan.

Pendidikan guru vokasi tentu merupakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada upaya mempersiapkan kemampuan mengajar di bidang vokasi. Tentu guru dimaksud setidaknya memiliki kemampuan didaktik metodik atau pedagogic dan kemampuan professional sesuai bidangnya. Potensi utama pengembangan pendidikan guru vokasi yaitu SMK dan sekolah yang berada di bawah yayasan dan kementerian yang ada di daerah. Potensi dimaksud berupa SDM maupun fasilitas yang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan guru vokasi. Bagaimana model pendidikan guru vokasi, tentu diawali dengan menjabarkan beberapa pendidikan SMK berbasis local maupun pendidikan kedinasan. Pada langkah berikutnya mengkaji suatu model berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki. Hasil kajian pula ada beberapa SMK masih dalam rencana/pengusulan dan pengembangan. Kebanyakan SMK yang ada di kabupaten Kota berasal dari SMU yang berubah, maupun SMK baru. Ada juga beberapa SMK yang dikelola yayasan maupun kementerian tertentu yang berubah pengelolaan ke pemerintah kabupaten Kota melalui dinas pendidikan dengan melakukan penyesuaian dan penambahan program studi. Pada survey untuk guru-guru ditemukan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kompetensi, pelatihan maupun pendidikan sesuai dengan penjenjangan. Masalah

utama yang dikemukakan yaitu pada saat yang sama tidak dapat meninggalkan tempat kerja karena keterbatasan guru. Pada bagian lain masih relative banyak jumlah guru pemula dan belum tersertifikasi. Pada data untuk beberapa SMK masih belum mencapai 50%.

Pendidikan SMK berbasis Lokal dan Kedinasan

Konsep pendirian SMK, selain mempertimbangkan kebutuhan lokal, juga didasarkan pada potensi SDA yang tersedia atau merupakan potensi utama di suatu daerah dan dapat pula menjadi ciri khas. Contoh suatu SMK di Kota Bitung berkaitan dengan perikanan, oleh karena itu program studi utama yang dikelola yaitu berbasis perikanan, dengan beberapa tambahan termasuk Teknik Komputer dan jaringan, dan multimedia. Contoh lain yaitu SMK di Kota Langowan Minahasa, berdiri dari SMK berbasis pertanian, karena berdiri di tengah persawahan, yang juga merupakan ciri khas, karena terdapat hamparan sawah yang luas. SMK tersebut dibangun dan dikelola di bawah dinas pertanian yang kemudian berkembang dan berubah menjadi SMK dengan beberapa program studi tambahan yang berbeda dari basic utama. Perubahan dan perkembangan dari bentuk awal dan tetapi juga ketika dikelola pemerintah, mendapat tambahan program studi TKJ dan akuntansi, yang dibutuhkan saat ini. Pendidikan kedinasan yang dulunya hanya mengkhususkan pada program studi yang sesuai dengan karakter tertentu, dibangun untuk tujuan pengembangan suatu bidang khusus dalam memenuhi kebutuhan dinas, berkembang secara perlahan menyesuaikan diri dengan penambahan beberapa program studi tertentu yang lebih luas dan untuk tujuan yang lebih didasarkan pada kondisi pasar kerja dan perkembangan di suatu daerah. Pada dasarnya pendidikan kedinasan di kabupaten dan kota secara perlahan telah berubah orientasi, dengan mengakomodir beberapa program studi lainnya untuk pengembangan, walaupun tidak menghilangkan konsep awal ketika dibangun.

Model program pendidikan guru berbasis lokal

Beberapa pertimbangan harus dilakukan dalam merencanakan suatu program pendidikan guru, antara lain pelayanan penunjang yang sering

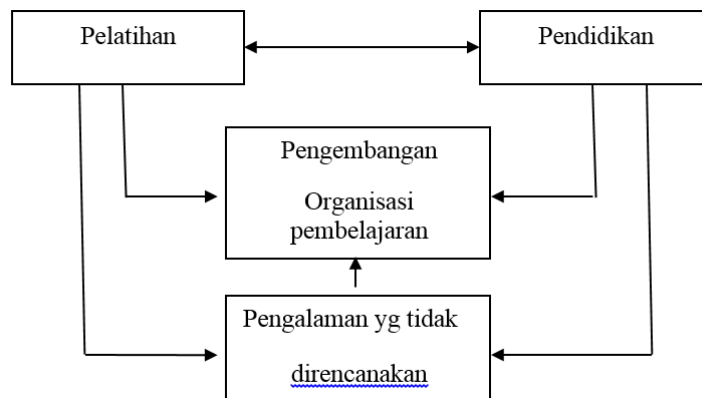
terabaikan. Pelayanan penunjang dimaksud antara lain meliputi : dana, ruangan/laboratorium, jadwal staf dan perlengkapan untuk peserta program. (Kemp, 1994 : 204). Pada situasi lain, penunjang yang diperlukan harus ditentukan dengan cermat dan dapat dibenarkan secara makul sebagai kegiatan belajar mengajar. Membangun model suatu program pendidikan guru, harus mempertimbangkan beberapa hal di atas, sebelum kemudian membuat suatu model yang melibatkan beberapa komponen lainnya. Konsep pendidikan guru berbasis local yaitu mempertimbangkan : tempat pelaksanaan, kebutuhan dan kesesuaian guru, fasilitas yang tersedia, peran LPTK dan pengelolaannya. Tempat pelaksanaan harus dilakukan di sekolah setempat atau memilih suatu sekolah di Kabupaten kota yang paling lengkap peralatan dan representative. Kebutuhan guru harus diprioritaskan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Fasilitas dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan mitra usaha dan industry setempat. Pelaksanaan program hanya memilih suatu program yang sesuai dengan kebutuhan local, sehingga dapat menghemat anggaran dan lebih sederhana dalam pelaksanaan. Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh LPTK sebagai penanggung jawab dan legitimasi lulusan.

Model program pendidikan guru yang integrative

Dibeberapa kabupaten dan kota, telah memiliki SMK yang dikelola yayasan maupun kementerian terkait dan memiliki fasilitas relative lengkap. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan, sehingga juga tempat pelaksanaan dapat dilakukan di tempat tersebut, dan pengelolaan program tetap melalui LPTK yang ada. Beberapa SMK yang ada dapat disatukan untuk beberapa program studi, sedangkan program studi lainnya disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas. Pada dasarnya beberapa program studi diintegrasikan disuatu tempat. Konsep model ini yaitu melakukan penggabungan seluruh potensi baik dana, fasilitas, sumberdaya manusia/staf di suatu tempat yang paling tepat untuk menyelenggarakan program pendidikan.

Model pelatihan

Kondisi pendidikan dapat mengintegrasikan model pendidikan regular dengan model pelatihan. Pelatihan selain memperoleh sertifikat, juga meningkatkan kualitas kompetensi sesuai dengan bidang. PLPG yang kini dilakukan semata untuk meningkatkan profesionalitas guru, yang lebih pada kompetensi social, kepribadian dan pedagogic. Perlu pula ada bentuk pelatihan untuk kompetensi professional yang dilakukan secara terencana, dan berkesinambungan.



Gambar 1. Hubungan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan (Buckley and Caple.2004;6).

Pada dasarnya model pada gambar ini menunjukkan keterkaitan antara pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Oleh karena itu setiap komponen tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Model Pengembangan

Pengembangan merupakan peningkatan ketrampilan dan kemampuan individu melalui belajar sadar dan tak sadar pada perspektif dimaksud terkandung makna dua hal pertama pengembangan dilakukan melalui pendidikan formal atau secara terencana, dan kedua dilakukan secara mandiri atau dilakukan secara informal oleh masing-masing individu. Model pengembangan yang demikian dapat dilakukan secara terbatas untuk beberapa orang guru yang dikirim untuk belajar disuatu tempat, namun pula secara tidak terukur dilakukan oleh sejumlah guru untuk mengembangkan diri secara sukarela. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan guru, peningkatan mutu untuk mendukung tugas guru

yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, kondisi sekolah dan lingkungannya.

Model program pendidikan guru professional sebagai alternative (gabungan)

Dari beberapa model yang telah dikemukakan dapat dibuat suatu model alternative, yaitu dapat menggabungkan beberapa model, ataupun memilih salah satu model yang tepat dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Model ini didasari oleh kaitan antara pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Pendidikan formal dilakukan secara berjenjang, dilanjutkan dengan pelatihan tertentu yang sesuai dengan bidang atau profesi dan kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Selesai pendidikan guru, dapat mengikuti pelatihan, kursus untuk memberi pengalaman praktikal di dunia usaha/industry dan kemudian memperoleh pengembangan melalui pendidikan berjenjang maupun secara mandiri. Pada dasarnya pengelolaan harus dilakukan oleh LPTK bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten dan Kota. Model yang relevan untuk kondisi Sulawesi Utara yaitu model integratif, sedangkan pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan secara parsial untuk waktu tertentu yaitu semester awal, selanjutnya melakukan praktek di daerah atau tempat local sedangkan evaluasi dilakukan di LPTK. Model pendidikan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan tempat pendidikan di Dinas kabupaten kota atau SMK yang representative, dengan melibatkan beberapa staf yang tersedia. Fasilitas administrasi dapat meminjam semua peralatan yang tersedia, sedangkan untuk praktek memanfaatkan fasilitas Laboratorium yang ada, atau meminjam dari dunia industry dan usaha yang telah tersedia. Program pendidikan dapat dilakukan lebih variatif tidak terbatas pada kebutuhan local saja, tetapi memanfaatkan semua potensi yang ada dan dilakukan untuk beberapa kabupaten kota yang mudah dalam jangkauan maupun komunikasi. Model pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan *e-learning* pada tahap awal, dapat dilakukan, sedangkan praktek dilakukan untuk profesi di tempat yang tersedia, sedangkan pedagogic dilakukan langsung di LPTK. LPTK sebagai pelaksana dapat memulai merencana bersama kepala dinas pendidikan kabupaten dan Kota beserta beberapa kepala SMK yang ada untuk memulai program. Pendanaan dilakukan dengan memanfaatkan mata

anggaran dari dinas Kabupaten kota yang secara khusus merencanakan dalam bentuk alokasi tertentu.

KESIMPULAN

1. Pendidikan SMK berbasis Lokal dapat dikembangkan dengan menyiapkan guru yang dapat dilatih di tempat bekerja, atau industry/usaha yang berdekatan dan difasilitasi, didukung oleh LPTK.
2. Pendidikan kedinasan, dijadikan sumber dan tempat belajar bagi guru-guru sekitar dan difasilitasi oleh LPTK setempat.
3. Pendidikan regular dilakukan LPTK, dan pelatihan dilakukan di dunia usaha dan Dunia Industri, melalui program kemitraan yang di koordinasi dengan pemerintah dan SMK yang ada. Model gabungan merupakan alternative bilamana semua elemen dan komponen pendidikan telah siap.
4. Pelatihan dilakukan oleh LPTK bersama SMK dan pemerintah melalui dinas pendidikan untuk guru pemula dalam rangka peningkatan kompetensi.
5. Model gabungan dilakukan melalui Pendidikan formal secara berjenjang, dilanjutkan dengan pelatihan tertentu yang sesuai dengan bidang atau profesi dan kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Selesai pendidikan guru, dapat mengikuti pelatihan, kursus untuk memberi pengalaman praktikal di dunia usaha/industry dan kemudian memperoleh pengembangan melalui pendidikan berjenjang maupun secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Buckley, R and Jim Caple.(2004). *The Theory & Practice of Training. Kogan Page; Revised Edition.*
- Kemp, J.E. (1994). *Proses Perancangan Pengajaran.* ITB. Bandung.
- Kuswana, W.S. (2013). *Dasar-dasar Pendidikan Vokasi dan Kejuruan.* Alfabeta. Bandung.
- Wukir, H. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Sekolah.* Multi Presindo. Jakarta.